

Latar Belakang Penerapan Ordonansi Pajak Penghasilan di Hindia Belanda tahun 1908-1942

Nadia Ayu Christine

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Surabaya
e-mail: nayuchristine@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penguasaan Belanda atas Indonesia dimulai sejak Juni 1596. Pada tahun 1830, kondisi keuangan Hindia Belanda maupun di negeri Belanda sendiri sama buruknya. Hutang pemerintah semakin besar dikarenakan terjadinya perang Diponegoro dan perang Belgia. Oleh karena itu, Van Den Bosch menerapkan sistem *Cultuurstelsel*. Sistem ini dimaksudkan untuk memacu hasil produksi perkebunan yang dilakukan oleh rakyat. Sejak perang Aceh berkobar tahun 1874, maka pemerintah Hindia Belanda memiliki banyak pengeluaran tambahan. Pemerintah Hindia Belanda masih memiliki hutang sebesar 400 juta gulden. Kemudian ditambah dengan biaya pembangunan jalan kereta api sebesar 150 juta gulden, irigasi sebesar 33 juta gulden, dan pelabuhan 30 juta gulden. Sehingga hutang pemerintah Hindia Belanda semakin bertambah. Usaha peningkatan pendapatan selain memacu peningkatan produksi sumber daya alam, juga mulai intensifikasi di bidang pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan permasalahan sebagai berikut 1) apakah yang melatar belakangi diterapkannya ordonansi pajak penghasilan tahun 1908-1942?. Tujuan dari dirumuskannya permasalahan tersebut adalah (1) Untuk menjelaskan latar belakang diterapkannya ordonansi pajak penghasilan di Hindia Belanda tahun 1908-1942. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Berdasarkan hasil analisis terhadap fakta dari sumber-sumber yang didapatkan, diperoleh hasil bahwa latar belakang diterapkannya ordonansi pajak penghasilan di Hindia Belanda tahun 1908-1942 adalah ketidak stabilan kondisi perekonomian di Hindia Belanda. Hal tersebut disebabkan oleh fluktuasi harga komoditi ekspor di pasaran dunia. Perang dunia yang terjadi juga mempengaruhi permintaan pasar. Fluktuasi tersebut yang menyebabkan kosongnya kas Belanda dan pemerintah Hindia Belanda mencari sumber pendapatan lain selain komoditas ekspor, yaitu dengan menerapkan peraturan perpajakan. Salah satunya adalah ordonansi pajak penghasilan.

Kata kunci : Pajak Penghasilan, Ordonansi, Hindia Belanda

ABSTRACT

Dutch mastery over Indonesia began in June 1596 . In 1830 , the financial condition of the Dutch East Indies and the Netherlands alone in just as bad . Greater government debt because of the war and the war Diponegoro Belgium . Therefore , Van Den Bosch apply Cultuurstelsel system . This system is intended to spur the production of plantation done by the people . Since the Aceh war broke out in 1874 , the Dutch government has a lot of extra expense . Dutch government still has a debt of 400 million guilders . Then added to the cost of construction of the railroad of 150 million guilders , irrigation of 33 million guilders , and the port 30 million guilders . So the Dutch East Indies government debt increased revenue in addition to the more bertambah. Usaha spur an increase in production of natural resources , also began intensification in the field of taxation .

Based on the background of the problem is formulated as follows 1) whether the background of the application of the income tax ordinance 1908 to 1942 ? . The purpose of the formulation of the problem is (1) To explain the background diterapkannyaordonansi income tax in the Netherlands East Indies in 1908-1942 . The method used is the method of historical research that includes heuristics , criticism , interpretation , and historiography .

Based on the analysis of the facts of the sources are obtained , the results showed that the background of the application of the income tax ordinance in the Dutch East Indies in 1908-1942 is the instability of economic conditions in the Dutch East Indies . This was caused by the export commodity price fluctuations on the world market . World war happens also affect market demand . The fluctuations that cause empty treasury Netherlands and the Dutch East Indies government seek other sources of income besides export commodities , namely by applying the tax laws . One is the income tax ordinance .

Keywords: Income Tax, ordinance, Dutch East Indies.

A. Pendahuluan

Eksplorasi ekonomi besar-besaran yang dilakukan pemerintah kolonial semakin terlihat ketika krisis dunia terjadi pada tahun 1930. Pemerintah kolonial selain menggunakan pajak sebagai sumber kasnya, juga mengandalkan sektor perdagangan sebagai sumber kas utama. Pada masa krisis dunia, kegiatan perdagangan, nilai mata uang, dan harga pasar dunia runtuh total.¹ Hal itu menyebabkan banyak perusahaan Belanda yang tutup. Akibatnya, terjadi penurunan upah dan pemecatan karyawan besar-besaran. Untuk menyelamatkan keadaan keuangan Belanda yang jatuh, pemerintah kolonial Belanda juga mengadakan penghematan besar-besaran yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat, diantaranya adalah dengan menaikkan pajak yang sangat besar kepada rakyat Hindia Belanda.² Hal tersebut dilakukan karena kondisi keuangan pemerintah Belanda yang terancam kosong.³ Pada tahun 1932, Pemerintah menerapkan suatu peraturan perpajakan yang dinamakan *Ordonantie Inkomstenbelasting 1932* atau Ordonansi Pajak Penghasilan 1932 untuk menambah jenis pajak yang dibebankan kepada rakyat Hindia Belanda.

Ordonansi pajak penghasilan (*Ordonantie Inkomstenbelasting*) sebenarnya bukan merupakan peraturan perpajakan yang sama sekali baru. Peraturan tersebut merupakan pengembangan dari peraturan pajak yang sudah ada sebelumnya. Pada tahun 1908 juga telah diterapkan *Inkomstenbelasting tahun 1908*.⁴ Ordonansi itu lebih dikenal dengan Ordonansi Pajak Rumah Tangga tahun 1908.⁵ Dengan didasarkan pada *Inkomstenbelasting tahun 1908*, pada tahun 1925 dikeluarkan Ordonansi

Pajak Perseroan.⁶ Ketika krisis ekonomi dunia tahun 1930 melanda Hindia Belanda yang mengakibatkan kosongnya kas Belanda, diterapkanlah sistem perpajakan baru yang bertujuan untuk mengisi kekosongan kas Hindia Belanda tersebut. Peraturan perpajakan itu disebut dengan Ordonansi Pajak Kekayaan atau Ordonansi Pajak Penghasilan tahun 1932.⁷ Ketika Indonesia berada di dalam kekuasaan pemerintah Jepang, peraturan itu diubah lagi dengan Ordonansi Pajak Pendapatan tahun 1944.⁸

Pajak Penghasilan yang diterapkan pada masa pemerintah kolonial Belanda merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara selain dari sektor sumber daya alam. Peraturan perpajakan tersebut diadaptasi dan digunakan oleh pemerintah Indonesia dengan melakukan berbagai pembaruan di dalamnya. Sebagai peraturan perpajakan yang cukup penting. Selama ini latar belakang mengenai diterapkannya peraturan perpajakan tersebut belum mendapatkan perhatian yang cukup besar dari pihak akademika sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti hal tersebut.

Batasan wilayah yang dipilih pada penelitian ini adalah wilayah Hindia Belanda dikarenakan penelitian ini mengkaji peraturan perpajakan Hindia Belanda secara luas. Penelitian ini meneliti tentang peraturan pajak penghasilan yang diterapkan untuk wilayah Hindia Belanda secara umum bukan secara khusus.

Pemilihan tahun 1908 hingga 1942 sebagai batasan spasial dari penelitian ini dipilih karena di tahun 1908 pajak penghasilan pertama kali diterapkan di Hindia Belanda dan tahun 1942 sebagai akhir dari diterapkannya pajak penghasilan kolonial.⁹

¹ Tim Program BSB. *Sekilas Sejarah Dunia*, hlm.185.

² Marwati Djoened. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia V*, Jakarta: Balai Pustaka. hlm.86.

³ M.C. Ricklefs. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi. hlm.333.

⁴ Rochmat Soemitro. 1960. *Perseroan Terbatas dengan Undang-undang Pajak Perseroan*. Bandung: Eresco. hlm.93.

⁵ Y. Sri Pudyatmoko. 1990. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Gramedia. hlm.94.

⁶ *Ibid*, hlm.93.

⁷ *Ibid*.

⁸ *Ibid*.

⁹ Gent, L.F Van, W.A. Penard, dan Dr. D.A. Rinkes. *Kitab Peringatan Oentoek Hindia Belanda Ketika SB Maharadja Poeteri Tjoekoep 25 Tahun Bertachta Keradjaan 1898 – 1923 halaman 373 – 381 tentang Keadaan Padjak*. hlm.374.

B. Metode Penelitian

Pada penelitian ini peneliti berusaha untuk menganalisis latar belakang penerapan Ordonansi Pajak Penghasilan di Hindia Belanda pada tahun 1908 hingga 1942. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sejarah. Tahap pertama yang peneliti lakukan adalah Heuristik. Peneliti mengumpulkan berbagai sumber yang relevan bagi penelitiannya dari berbagai instansi yang dianggap memilikinya seperti: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Arsip Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Daerah Surabaya, dan Arsip Daerah Jawa Timur. Dari penelusuran sumber yang penulis lakukan, penulis mendapatkan beberapa sumber berkaitan dengan Pajak Penghasilan masa kolonial, baik berupa sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer yang penulis dapatkan adalah *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* tahun 1908 No. 299, *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* tahun 1925 No. 421, 171, 313., *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* tahun 1932 No. 25, 116, *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* tahun 1935 No.637, 72, *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* tahun 1938 No.687, *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* tahun 1939 No. 558, 730, Gent, L.F Van, W.A. Penard, dan Dr. D.A. Rinkes. *Kitab Peringatan Oentoek Hindia Belanda Ketika SB Maharadja Poeteri Tjoekoep 25 Tahoen Bertachta Keradjaan 1898 – 1923 halaman 373 – 381 tentang Keadaan Padjak*.

Sumber yang telah terkumpul selanjutnya diuji melalui metode yang kedua yaitu kritik. Sumber primer yang telah didapat yakni *staatsblad*. Sumber primer dikaji ulang agar didapatkan data yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Pada tahap kritik, penulis menguji keakuratan data maupun isi dari sumber yang penulis dapatkan dengan membandingkan sumber satu dengan sumber yang lain. Menggunakan data dari arsip atau sumber utama, maka data yang ada diartikan dan ditafsirkan sehingga dapat dengan mudah dimengerti. Sumber sekunder juga membantu dalam hal menafsirkan. Dengan menggunakan buku sebagai sumber sekunder

penulis akan dapat membangun kerangka berpikir untuk melakukan historiografi sesuai dengan bangunan teori yang ada.

Teori bantu yang digunakan penulis dalam melakukan historiografi adalah teori kebijakan publik yang disampaikan oleh James Anderson. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator yang pertama. Hal tersebut dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki apa yang melatar belakangi diterapkannya ordonansi pajak penghasilan di Hindia Belanda tahun 1908-1942. Diharapkan dengan menggunakan indikator yang pertama, peneliti akan dapat dengan mudah melakukan historiografi atau penulisan data-data dengan runtut dan dapat mudah dimengerti pembaca.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Awal Penjajahan Belanda di Hindia Belanda

Hindia Belanda adalah satu kawasan kepulauan yang berada di daerah tropis. Selain memiliki iklim tropis, nusantara memiliki letak yang strategis, yakni diantara dua benua dan dua samudera. Beberapa faktor di atas yang menjadikan nusantara sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan akan sumber daya itulah yang mengundang bangsa asing untuk melakukan perdagangan dengan nusantara.

Kedatangan bangsa asing ke wilayah nusantara bukan hanya untuk melakukan perdagangan saja, tetapi juga untuk menguasai nusantara sehingga dimulailah masa penjajahan di wilayah nusantara pada tahun 1511 oleh bangsa Portugis.¹⁰ Belanda mulai masuk ke nusantara pada tahun 1595. Kedatangan Belanda adalah untuk melakukan perdagangan rempah, namun kedatangan empat belas perusahaan ekspedisi yang berbeda menimbulkan persaingan di antara mereka. Agar dapat bersaing dengan orang-orang Portugis dan menghindari persaingan antara pedagang-pedagang Belanda sendiri, pihak Belanda pada bulan Maret 1602

¹⁰ Furnivall, J.S., 2009, *HINDIA BELANDA. Studi Tentang Ekonomi Majemuk*, Jakarta: Freedom Institute, hlm.16.

membentuk Serikat Dagang Belanda di Hindia yang disebut *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC).¹¹ Serikat dagang tersebut berwatak semi pemerintah. Badan itu dibantu, dipersenjatai, dan dilindungi oleh pemerintah Belanda.

VOC dibubarkan pada tahun 1798.¹² Dibubarkannya VOC karena terjadi korupsi di kalangan pejabat VOC sendiri yang akhirnya mengakibatkan kebangkrutan VOC. Setelah VOC dibubarkan, penjajahan Belanda tidak berhenti sampai disitu. Belanda memulai lagi masa penjajahannya pada era baru.

Pada tahun 1830, kondisi keuangan Nusantara maupun di negeri Belanda sendiri sama buruknya. Hutang pemerintah semakin besar dikarenakan terjadinya perang Diponegoro dan perang Belgia. Oleh karena itu, Van Den Bosch menerapkan sistem *Cultuurstelsel* atau tanam paksa.¹³ Sistem ini dimaksudkan untuk memacu hasil produksi perkebunan yang dilakukan oleh rakyat.

Pada masa ini Belanda menerapkan sistem tanam paksa untuk memacu produksi alam. Dalam memacu hasil produksi tersebut, pribumi diharuskan membayar pajak dalam bentuk hasil bumi yang dapat dijual kembali untuk barang ekspor. Setiap desa diharuskan menyisihkan sebagian tanahnya (20%) untuk ditanami komoditi ekspor, khususnya kopi, tebu, dan nila.¹⁴ Hasil tanaman ini akan dijual kepada pemerintah kolonial dengan harga yang sudah dipastikan dan hasil panen diserahkan kepada pemerintah kolonial. Penduduk desa yang tidak memiliki tanah harus bekerja 75 hari dalam setahun (20%) pada kebun-kebun milik pemerintah yang menjadi semacam pajak.

Pada prakteknya peraturan itu dapat dikatakan tidak berarti karena seluruh wilayah pertanian wajib ditanami tanaman laku ekspor dan hasilnya diserahkan kepada pemerintahan Belanda. Wilayah yang digunakan untuk praktek *cultuurstelsel* pun tetap dikenakan pajak.

Warga yang tidak memiliki lahan pertanian wajib bekerja selama setahun penuh di lahan pertanian. Kelebihan hasil panen dianggap sebagai pajak dan harus dijual kepada pemerintah dengan harga yang juga sudah ditentukan.¹⁵ Aset tanam paksa inilah yang memberikan sumbangan besar bagi modal pada zaman keemasan kolonialis liberal Hindia-Belanda pada 1835 hingga 1940.

Tabel 1. Nilai Ekspor Barang Swasta tahun 1830-1850

Tahun	Nilai Ekspor Total (f .000)	Nilai Ekspor ke negeri Belanda (f .000)
1830	12.753	6.586
1831	14.115	6.813
1832	21.081	13.021
1833	22.595	13.953
1834	29.220	19.129
1835	32.158	22.331
1840	73.972	56.892
1845	64.455	48.024
1850	57.320	44.803

Sumber: J.S.Furnivall, 2009. *HINDIA BELANDA. Studi Tentang Ekonomi Majemuk*. Jakarta: Freedom Institute. halaman 138.

Pada tabel 2.1. di atas terlihat bahwa sejak diterapkannya sistem tanam paksa, nilai ekspor semakin meningkat. Semakin besar nilai ekspor, semakin besar pemerintah Hindia Belanda mengirimkan kekayaan untuk negaranya. Perlu diperhatikan pada tabel di atas nilai ekspor yang masuk ke negeri Belanda semakin bertambah setiap tahunnya. Sistem tanam paksa berhasil untuk mendongkrak kas Belanda.

Hal tersebut tidak berlaku di Hindia Belanda. Nilai ekspor yang meningkat terus hanya menguntungkan pemerintah Belanda. Hindia Belanda sebagai negara tempat produksi hanya menikmati kurang dari sepertiga dari hasil ekspor yang diperoleh. Hal tersebut jugalah yang akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

2. Kondisi Keuangan pemerintah Hindia Belanda

Tidak selamanya pemerintah Hindia Belanda merasakan keuntungan dari sistem tanam paksa. Sejak tahun 1840 pemerintah Hindia Belanda mulai menghadapi masalah. Dampak dari pelaksanaan tanam

¹¹ *Ibid.* hlm 51.

¹² Poesponegoro, Marwati Djoened, 1976, *Sejarah Nasional Indonesia V*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm.1.

¹³ *Ibid.*, hlm.7.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid.*

paksa mulai nampak, khususnya bagi pribumi Jawa. Kelangkaan beras terjadi sebagai akibat dari kurangnya lahan pertanian yang digunakan untuk menanam padi dan terkurasnya kesuburan tanah akibat penanaman tanaman produksi nila yang mengakibatkan terjadinya kelaparan di Jawa.¹⁶ Kelaparan sebenarnya terjadi akibat melambungnya harga beras di pasaran sehingga pribumi yang menjadi buruh kasar tidak mampu membeli. Hal tersebut yang mengakibatkan terjadinya penurunan produktifitas komoditi ekspor.

Penurunan produktifitas tersebut disebabkan karena sistem Tanam Paksa yang tidak efektif. Dikatakan tidak efektif karena pelaksanaan tanam paksa tidak diiringi dengan pengetahuan yang cukup tentang budidaya tanaman ekspor.¹⁷ Pengetahuan ini meliputi cara menanam tanam ekspor yang baik, irigasi pertanian yang baik, serta perawatan tanaman. Selain itu, karena tersedia banyaknya tenaga kerja yang murah, menjadikan para pengusaha swasta tersebut serakah dalam menggunakannya. Luas tanah yang dikerjakan tidak sebanding dengan tenaga kerja yang digunakan.

Penurunan produktifitas tersebut mendorong diadakannya reformasi dalam sistem tanam paksa di Hindia Belanda. Reformasi tersebut dimulai sejak tahun 1840-an ketika krisis sedang melanda Hindia Belanda. Pertentangan akan sistem tanam paksa mulai muncul di negara Belanda. Para pemilik modal yang berasal dari kalangan menengah mendesak pemerintah agar pemerintah mengurangi peranannya terhadap Hindia Belanda dengan kata lain, mereka menginginkan sistem liberal diberlakukan.¹⁸ Selain pengurangan peranan pemerintah, mereka juga menuntut agar pemerintah memberikan kebebasan pada para pengusaha swasta dan juga menghapuskan penindasan para buruh pribumi.¹⁹ Pada akhirnya pemerintah memutuskan agar sistem tanam paksa dihapuskan sedikit demi sedikit.

Pengurangan peranan pemerintah diawali dengan dihapuskannya penanaman komoditas pertanian di seluruh wilayah Hindia Belanda. Penghapusan penanaman komoditas ini dilakukan secara bertahap. Dimulai dengan dihapuskannya tanaman dengan keuntungan yang paling sedikit di antara tanaman yang lain, dan diikuti dengan tanaman lain yang memiliki keuntungan lebih besar. Penghapusan tanaman ini dimulai dengan lada pada tahun 1862. Dilanjutkan cengkeh dan pala pada tahun 1865. Berikutnya nila, teh, dan kayu manis pada tahun 1865. Tembakau dihapuskan pada 1866. Penghapusan tanaman yang paling akhir adalah tebu dan kopi karena dua tanaman ini merupakan komoditas utama.²⁰

Kebijakan ini juga yang mengakibatkan diberlakukannya Undang-undang Agraria 1870. Undang-undang ini mengatur bahwa kepemilikan tanah berada pada pribumi Hindia Belanda. Maksudnya hanyalah pribumi yang dapat memiliki tanah di Hindia Belanda. Para pemilik modal hanyalah penyewa yang diperbolehkan menyewa selama masa 75 tahun dari pemerintah. Penyewaan dari pribumi hanya diperbolehkan dalam kurun waktu 5 – 20 tahun saja atau tergantung pada pemilik tanah.

Undang-undang agraria 1870 menjamin kebebasan berusaha bagi para pemilik modal. Kebebasan tersebut memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan produktifitas dari swasta. Pada tahun 1885 nilai ekspor swasta mencapai sepuluh kali lipat ekspor pemerintah. Total ekspor tahun 1885 adalah dua kali lipat jumlah ekspor tahun 1860.²¹ Namun Undang-undang Agraria dianggap sama seperti sistem tanam paksa. Hal tersebut dikarenakan undang-undang yang tujuannya untuk meningkatkan taraf hidup petani dan pemilik tanah nyatanya, tidak berbuat apapun untuk peningkatan kesejahteraan. Penghasilan buruh, pedagang, dan pengrajin merosot tajam.

Pada tahun 1870-an terjadi krisis yang menekan baik pribumi maupun pemerintah Hindia Belanda. Krisis

¹⁶ Ricklefs, M.C., *op.cit.* hlm 268-269.

¹⁷ Zanden, Jan Luiten Van, Daan Maars, 2012, *Ekonomi Indonesia 1800-2010*, Jakarta: Kompas, hlm. 107-108.

¹⁸ Ricklefs, M.C., *op.cit.*, hlm. 269-270.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hlm. 271.

tersebut menimpa negara agraris penghasil kopi dan gula. Sejak tahun 1878 penyakit daun kopi menyebar dan terjadi penurunan proses produksi kopi. Harga kopi juga menurun drastis.²² Antara tahun 1877 hingga tahun 1883 harga kopi turun dari f 60.- ke harga f 30-35 per pikul. Belum lagi pada tahun 1882 terjadi hama gula dan hama ini menyebar ke seluruh penjuru Jawa. Ditambah lagi dengan membanjirnya gula bit di pasaran Eropa. Gula bit diperkenalkan pada pasaran Eropa yang mengakibatkan jatuhnya harga gula. Akibatnya perdagangan terhenti dan para pemilik tanah bangkrut.²³ Para buruh kasar pribumi diberhentikan. Namun pribumi masih harus membayar pajak yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut semakin menambah kesengsaraan pribumi.

Sejak tahun 1831 hingga 1877 keuntungan yang diperoleh pemerintah Hindia Belanda dari tanam paksa berjumlah 823 juta gulden. Keuntungan ini digunakan untuk membayar hutang, menurunkan pajak negara Belanda, membangun jaringan kereta api, dan memperbaiki bangunan pertahanan. Berikut adalah rincian pengeluaran keuangan di negeri Belanda selama kurun waktu 1831-1877.

Tabel 2. Rincian Pengeluaran di negeri Belanda 1831-1877

Rincian Pengeluaran	Banyaknya (dalam juta gulden)
Membayar hutang	236
Menurunkan pajak Belanda	115
Membangun jaringan kereta api	153
Memperbaiki bangunan pertahanan	146

Sumber: Marwati Djoened. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta: Balai Pustaka. Hlm.12.

Pemerintah Hindia Belanda memiliki banyak pengeluaran tambahan sejak perang Aceh berkobar tahun 1874. Ditambah dengan biaya pembangunan jalan kereta api sebesar 150 juta gulden, irigasi sebesar 33 juta

gulden, dan pelabuhan 30 juta gulden, sehingga hutang pemerintah Hindia Belanda semakin bertambah.

Pada tahun 1900 adalah masa dimulainya kapitalisasi Hindia Belanda. Modal asing mulai masuk ke Hindia Belanda. Perdebatan yang berlangsung di Belanda tentang kebijakan kolonial yang lebih tepat dihasilkan pada tahun 1901, yaitu politik etis.²⁴ Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memajukan kesejahteraan penduduk pribumi Indonesia. Kebijakan politik etis juga mendorong masuknya sejumlah modal asing ke Hindia Belanda, diantaranya adalah modal yang berasal dari Inggris.

Sekitar tahun 1900 modal asing yang berasal dari Inggris berjumlah besar masuk ke Hindia Belanda. Modal ini diinvestasikan ke dalam perkebunan teh. Dilanjutkan pada 1905, Inggris menginvestasikan modalnya pada perkebunan karet. Pada tahun 1912, dari 101 perkebunan karet yang ada di Jawa, 50 di antaranya berada di tangan orang Inggris. Walaupun begitu, perkebunan tebu masih dikuasai oleh orang Belanda. Kekhawatiran mulai muncul di saat modal asing terlalu banyak menguasai perusahaan di Hindia Belanda, namun Belanda memotong aliran modal tersebut ketika terjadi perang dunia I. Setelah tahun 1920, Belanda sudah menanamkan modal yang lebih besar pada perusahaan swasta dibandingkan dengan negara asing lain.²⁵

Setelah tahun 1920, pengeluaran pemerintah Hindia Belanda meningkat drastis. Pengeluaran ini ditujukan untuk membiayai program kesejahteraan. Hal tersebut berhubungan dengan diadakannya politik etis yang dimulai pada abad ke XX.²⁶ Pengeluaran negara meningkat, tetapi kesejahteraan masyarakat juga meningkat terutama dalam bidang pendidikan dan pertanian. Selain itu irigasi juga menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kondisi keuangan Hindia Belanda pada kurun waktu 1920 – 1929 (sebelum terjadinya depresi) merupakan tahun kemakmuran Hindia Belanda.

²⁴ Zanden, Jan Luiten Van, Daan Maarks, *op.cit.*, hlm.31.

²⁵ Furnivall, J.S., *op.cit.*, hlm.326.

²⁶ Zanden, Jan Luiten Van, Daan Maarks, *op.cit.*, hlm.199-200.

²² Furnivall, J.S., 2009, *HINDIA BELANDA. Studi Tentang Ekonomi Majemuk*, Jakarta: Freedom Institute, hlm .208.

²³ Ricklefs, M.C., *op.cit.* hlm., 272-273.

Walaupun pada waktu ini kondisi keuangan Hindia Belanda sedang mengalami perbaikan, namun pengeluaran pemerintah dalam memperbaiki kesejahteraan pribumi diprotes oleh Produksi barang-barang ekspor meningkat, harga pasaran dunia juga bagus. Tetapi hal tersebut tidak berlangsung lama.

3. Depresi Ekonomi

Akhir dari Perang Dunia I sebenarnya dianggap sebagai jalan menuju suatu jaman baru yang penuh damai dan tidak ada senjata namun banyaknya sengketa yang terjadi menghancurkan keseimbangan ekonomi dunia. Hal ini menyebabkan memberikan kesempatan pada pemberontakan komunis dan mengakibatkan kepercayaan rakyat pada politik demokratis menghilang. Pada tahun 1929, dunia dilanda krisis ekonomi dan keuangan terburuk yang pernah terjadi dalam sejarah ekonomi modern.²⁷ Krisis ekonomi dunia ini mengakibatkan perdagangan, nilai mata uang, dan harga pasar runtuh total. Puluhan juta pekerja mengalami PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Akibat dari krisis ekonomi dunia ini pasar saham jatuh hingga 85% banyaknya. Artinya para pemilik perusahaan kehilangan hampir semua kekayaan miliknya. Tingginya tingkat pengangguran, tingginya harga barang, dan jatuhnya nilai mata uang, maka tingkat bunuh diri di kalangan rakyat kecil di dunia meningkat drastis. Krisis ini disebabkan oleh empat faktor, yakni:

1. Biaya Perang Dunia I dan segala utang yang belum dibayar, menyangkut terjadinya Perang Dunia I.
2. Standar emas tidak dapat dipertahankan sepenuhnya. Karena emas digunakan sebagai standar pengukur nilai moneter yang mengatur nilai mata uang dunia anjlok.
3. Jatuhnya harga saham internasional maupun nasional mengakibatkan keuntungan sangat berkurang.
4. Ketidakpercayaan pada pasar ekonomi.²⁸

²⁷ Tim Program BSB. *Sekilas Sejarah Dunia*, hlm.

²⁸ *Ibid*, hlm.185.

Keruntuhan ekonomi dunia ini mengakibatkan negara-negara kapitalis di Eropa dan Amerika jatuh ke dalam krisis besar yang memberi kesempatan berdirinya partai ekstrim di negaranya. Akibat Perang Dunia I, persekutuan negara Eropa tidak berhasil mengokohkan pemerintahan demokratis, memperkuat kerja sama antar negara dan menyatukan negara yang terpecah akibat Perang Dunia I. Di lain sisi krisis ekonomi dunia mengakibatkan perlawanan dari beberapa negara Eropa. Pemerintahan demokratis terancam dan melahirkan politik ekstrim: kekuasaan yang didasari oleh militer, diktator, anarki, dan radikal. Perkembangan demokrasi yang telah terjadi terhenti selama puluhan tahun.²⁹

Kemakmuran Hindia Belanda berakhir pada 1929. Di saat barang-barang produksi ekspor terus meningkat, permintaan pasar menurun. Hal itu terjadi karena adanya pesaing lain dalam bidang produksi hasil alam. Pada saat yang sama, Inggris memproduksi gula bit, Jepang juga memproduksi gula dengan hasil produksi yang juga meningkat. Sejak 1926 harga gula turun dari f 17,14 per 100 kg menjadi f 12,52 per 100 kg pada tahun 1929. Harga timah juga turun yang semula f 3.440 per ton menjadi f 2.400 per ton.³⁰

Perekonomian Hindia Belanda sangat bergantung pada ekspor terutama pada bidang pertaniannya. Ketika pada 1929 bursa saham di Wall Street jatuh, maka harga barang-barang pertanian juga ikut jatuh. Harga produk ekspor menurun dengan tajam, tetapi harga barang manufaktur yang diimpor Hindia Belanda tidak turun sebanyak barang ekspor.³¹ Reaksi yang timbul akibat adanya depresi adalah menurunkan harga komoditas ekspor dan tetap meningkatkan produksi. Walaupun harga komoditas ekspor telah diturunkan, tetapi pasar dunia telah melakukan proteksi untuk menjaga perekonomian negaranya dengan cara menghentikan kegiatan impor barang dari luar negeri.³²

²⁹ *Ibid*.

³⁰ Furnivall, J.S., *op.cit.*, hlm 452.

³¹ *Ibid*.

³² *Ibid*.

Sehingga penghasilan negara dari sektor ekspor berkurang.

Sejak tahun 1929 hingga 1930, rata-rata harga barang ekspor Hindia Belanda menurun sebesar 28%. Tahun berikutnya harga kembali turun sebesar 25% yang disusul kejatuhan berturut-turut sebesar 21% dan 11%. Pada tahun 1933 harga tersebut menjadi 35% dari keadaan tahun 1929 dan kurang dari 31% terhadap harga rata-rata masa 1923-1927. Volume ekspor yang dihitung dalam satuan ton, pada tahun 1931-1933 merosot hingga tidak lebih dari 17% menurut jumlah 1929. Akibatnya tampak pada pendapatan rata-rata. Selama 5 tahun pertama 1930-an, pendapatan ekspor tinggal 37% dari pendapatan rata-rata ekspor selama lima tahun bagian kedua masa 1920-an. Angka pendapatan di tahun 1935 adalah kurang dari setengah yang diperoleh dari satu dekade sebelumnya.³³

Kebijakan Hindia Belanda adalah perdagangan bebas, standar emas, anggaran berimbang dan persaingan terbuka. Pada 1930-1936 pemerintah Hindia Belanda selalu defisit dalam neraca keuangan sehingga harus berhutang yang jumlahnya bertambah besar. Keadaan itu menyebabkan pengambilan kebijakan untuk pengurangan tenaga pegawai, gaji dikurangi, penghentian penambahan pegawai di Eropa, pensiun lebih awal, pengurangan biaya pengeluaran belanja pemerintah dan penenaan cukai tambahan untuk menambah kas negara kolonial. Kesemuanya merupakan akibat politik ekonomi yang pada satu pihak menjalankan penghematan secara besar-besaran dan di pihak lain hendak mempertahankan pendapatan ekspor terutama yang diperoleh dari hasil perkebunan, padahal nilai *gulden* yang dipertahankan mau tak mau mengurangi daya beli negara-negara pengimpor.³⁴

Saat krisis ekonomi sedang berada dalam kondisi puncak, kerajaan Belanda dan Hindia Belanda masih mempertahankan standar emas dan tidak

mendevaluasi guldenya. Akibat politik moneter ini sangat luas dan menyeret perekonomian Hindia Belanda ke dalam penderitaan selama beberapa tahun. Tindakan yang dijalani pemerintah kolonial adalah seperti menurunkan gaji dan upah, mengadakan pajak-pajak baru dan menurunkan berbagai tarif dan lainnya. Politik deflasi ini dapat dijalankan karena di negara jajahan tidak ada serikat buruh. Ekonomi pedesaan juga terkena depresi dengan menurunnya harga hasil bumi, ketela, jagung dan padi, sedangkan harga komoditas praktis tidak turun. Masyarakat menderita kerugian karena berkurangnya sewa tanah, upah buruh dan pembayaran beberapa pelayanan.

Gambaran Hindia Belanda menjelang *malaise* adalah suatu perekonomian yang kompleks dengan tujuan memperbesar jumlah ekspor hasil-hasil pertanian dan pemenuhan kebutuhan material masyarakat daerah pedesaan apa adanya. Kesulitan yang dialami Hindia-Belanda dalam melakukan ekspor saat masa depresi adalah kesulitan mencari pasar dan malah muncul pesaing-pesaing negara pengekspor baru. Seperti yang dialami ekspor gula, teh, tembakau dan nila. Selain itu ketersediaan bahan makanan untuk per kapita menurun dari tahun 1930 hingga tahun 1934. Sungguh tidak diragukan lagi bahwa kesejahteraan Indonesia menurun.³⁵

Krisis ekonomi tersebut mempengaruhi kondisi politik dan ekonomi di Hindia Belanda. Tidak berfungsinya perbankan, pabrik-pabrik atau industri menyebabkan terjadinya pemecatan buruh besar-besaran. Dampaknya pengangguran besar-besaran pun terjadi dan eksploitasi pemerintah terhadap kolonial Belanda semakin memberatkan. Karena kekurangan kas, maka pemerintah kolonial menetapkan peraturan pajak yang baru. Peraturan yang baru ini adalah Ordonansi Pajak Penghasilan 1932. Melalui Ordonansi ini pemerintah kolonial berusaha mendapatkan kembali sumber penerimaan yang tidak mereka peroleh lagi dari sektor hasil bumi karena adanya depresi ekonomi dunia. Ordonansi ini nyatanya mengambil alih posisi tertinggi

³³ Marwati Djoened, *Sejarah Nasional Indonesia* V, hlm. 254.

³⁴ Kartodirjo, Sartono, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional (Jilid II)*, hlm. 179.

³⁵ Ricklefs, M.C., *op.cit*, hlm. 402.

sebagai sumber pendapatan pemerintah menggantikan sektor hasil bumi.

D. Kesimpulan

Kondisi keuangan Hindia Belanda dapat dikatakan sebagai sebuah grafik yang dapat naik dan turun dengan drastis. Hal ini disebabkan oleh ketidakstabilan harga produksi alam di pasaran. Harga yang tidak stabil ini disebabkan oleh banyaknya peperangan yang terjadi di dunia pada saat itu. Ketidakstabilan keuangan Belanda juga berdampak pada pribumi. Pribumi yang bertindak sebagai buruh kasar menjadi sasaran. Akibat dari naik turunnya harga hasil bumi serta kondisi keuangan yang juga tidak stabil adalah ditapkannya peraturan perpajakan yang sangat memberatkan pribumi. oleh pemerintah Hindia Belanda. Bagi pemerintah Hindia Belanda hal ini menguntungkan, namun bagi pribumi hal ini sangat merugikan.

Ordonansi pajak penghasilan adalah salah satu kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengisi kekurangan kasnya akibat dari keadaan ekonomi yang tidak stabil. Melalui pajak penghasilan, pemerintah Hindia Belanda berhasil mempertahankan kondisi

keuangannya, sedangkan untuk komoditas ekspor, keadaannya tidak stabil.

E. Saran

Materi tentang perpajakan pada saat ini, dapat dijumpai pada mata pelajaran ekonomi. Materi yang diajarkan hanyalah berupa pengertian tentang pajak, cara menghitung, dan sebagainya. Namun, satu poin penting yaitu sejarah diterapkannya pajak di Indonesia sering luput dari perhatian guru-guru. Menurut penulis, sejarah perpajakan di Indonesia sangat menarik untuk dipelajari dan untuk diajarkan. Karena dari diajarkannya sejarah perpajakan di Indonesia, maka secara otomatis siswa juga akan belajar tentang sejarah ekonomi di Indonesia. Materi tentang sejarah perpajakan di Indonesia dapat diajarkan melalui materi penjajahan Belanda di Indonesia. Dimulai sejak kedatangan bangsa Belanda, masa VOC, masa liberal, dan masa penjajahan modern. Dengan mempelajari tentang sejarah ekonomi Indonesia siswa diharapkan dapat lebih memahami kondisi Indonesia pada saat itu, dan lebih menghargai sejarah dan perjuangan para pahlawannya.

Daftar Pustaka

- Furnivall, J.S., 2009, *HINDIA BELANDA. Studi Tentang Ekonomi Majemuk*, Jakarta: Freedom Institute.
- Gent, L.F Van, W.A. Penard, dan Dr. D.A. Rinkes. *Kitab Peringatan Oentoek Hindia Belanda Ketika SB Maharadja Poeteri Tjoekoep 25 Tahoen Bertachta Keradjaan 1898 – 1923 halaman 373 – 381 tentang Keadaan Padjak*.
- Poepanegoro, Marwati Djoened. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta: Balai Pustaka
- Ricklefs, M.C 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi.
- Soemitro, Rochmat. 1960. *Perseroan Terbatas dengan Undang-undang Pajak Perseroan*. Bandung: Eresco.
- Tim Program BSB. 2011. *Sekilas Sejarah Dunia*. Bali: Yayasan Gemah Ripah.
- Y. Sri Pudyatmoko. 1990. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: Gramedia.
- Zanden, Jan Luiten Van, Daan Maarks, 2012, *Ekonomi Indonesia 1800-2010*, Jakarta: Kompas